

Jurnal Yustisiabel
Volume 4 Nomor 1 April 2020

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Luwuk

MEMBANGUN KEADABAN POLITIK PENGAKUAN DALAM UPAYA MEREDAM ISU AGAMA

Blasius Mau Kau, Hari Sutra Disemadi, Yusriadi
 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
 Email: kurablasius@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa kini muncul konflik-konflik serupa di sekitar politik diferensiasi (perbedaan). Dimana gengsi politik universal berjuang demi bentuk-bentuk non-diskriminasi sebagai kewajiban yang dengan tenang, tidak mampu melihat cara-cara mana yang para warga negara tersebut berbeda politik diferensiasi sering mendefinisikan asas non-diskriminasi sebagai kewajiban bahwa kita membuat distingsi distingsi ini. Suatu dasar perlakuan diferensial. Sehingga kelompok-kelompok anggota suku asli (pribumi) akan mendapat hak-hak dan kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak dinikmati oleh orang-orang Kanada lainnya, jika tuntutan-tuntutan otonomi pemerintahan penduduk asli (pribumi) secara final disepakati, dan kelompok-kelompok minoritas tertentu akan mendapatkan hak untuk melarang masuk orang lain dengan maksud agar dapat memelihara integritas kultural mereka dan lain sebagainya. Namun isu diferensiasi agama akhir-akhir ini mencuat dalam diskursus bangsa ini. Agama di *frame* jadi instrumen politik, bahkan ditunggangi demi kepentingan sesat untuk kelompok lain, sehingga eksistensi bangsa tentang *given* sebagai multikultural sedikit mengalami guncangan.

Kata kunci : Politik Pengakuan, Meredam Isu Agama

ABSTRACT

Nowadays similar conflicts are arising around the politics of differentiation. Where universal political prestige fights for forms of non-discrimination as obligations which are calm, unable to see which ways the citizens of different political differentiation often define the principle of non-discrimination as an obligation that we make this distinction distinction. A basis for differential treatment. So that groups of indigenous (native) tribal members will receive certain rights and powers that are not enjoyed by other Canadians, if the demands of the autonomy of the indigenous government are finally agreed, and minority groups are certain people will get the right to prohibit entry of others to maintain their cultural integrity and so on. But the issue of religious differentiation lately is sticking out in the discourse of this nation. Religion in the frame becomes a political instrument, even ridden for the sake of misguided interests for other groups, so that the existence of the nation about given as a multicultural experience a little shock.

Keywords: Politics of Recognition, Dampening Religious Issues

Latar Belakang

Konsep politik pengakuan di ruang publik, secara normatif, seringkali didefinisikan sebagai suatu arena kehidupan sosial, tempat dimana orang dapat berkumpul bersama, dan secara bebas mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai permasalahan sosial. Karena itu, persoalan masyarakat tidak terlepas dari ruang publik sebagai ranah, untuk membicarakan ideologi, identitas, serta kultur untuk membangun kehidupan umat beragama.

Sejalan dengan meningkatnya intensitas diskusi dan berjalannya waktu, persoalan-persoalan yang terjadi di dalam ruang publik menyangkut kehidupan beragama akhir-akhir ini menimbulkan berbagai pro-kontra, bahkan ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dalam masyarakat Indonesia sendiri. Secara ideal, politik pengakuan juga sering dibayangkan sebagai ruang diskursif, dimana setiap orang dan setiap kelompok agama dapat berkumpul untuk membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sehingga, bila mungkin, mereka bisa sampai pada keputusan bersama (Zazili, 2016).

Menanggapi isu-isu agama yang mencuat akhir-akhir ini, perlu

membangun sikap keadaban sebagai warga negara, untuk saling memberi pengakuan kepada yang berbeda agar keutuhan sebagai suatu bangsa tetap terjaga (Rahayu, 2017). Namun tanpa dipungkiri bahwa ada kekerasan atas nama agama, diskriminasi, bahkan doktrin pembenaran untuk melakukan kejahatan kepada yang berbeda, namun tindakan ini hanya mengatasnamakan oknum-oknum tertentu. Karena itu pengenalan akan politik pengakuan sangatlah penting untuk menjaga pluralitas beragama.

Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Sedapat mungkin dengan penulis dengan selektif berjuang untuk memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan topik tulisan ini baik secara langsung maupun tak langsung. Dari literatur-literatur itu, penulis berusaha mengumpulkan, menginterpretasi, membuat sintesis, menemukan koherensi internal setiap konsep secara holistik, mencari pengertian yang ideal, kemudian mengkaji pemikiran mengenai politik pengakuan dan pemikiran teoritis lain tentangnya, dengan bahasa pemahaman sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan Sebagai Mutlak Politik Kultural

Salah satu politik kultural adalah politik identitas yaitu pengakuan akan kesetaraan nilai-nilai kultur yang berbeda-beda sebagai dasar universal yang dibutuhkan bagi suatu penerimaan tak bersyarat. Dalam rasa penerimaan itu terkandung di dalamnya afirmasi akan partikularitas etnik yang mengandung potensi nilai universal yang bisa dibagikan pada orang lain. Politik identitas memperlihatkan sebuah ekspresi mengenai begitu kompleksnya kebutuhan manusia akan perasaan penerimaan dan memiliki (*sense of belonging*) (Gahral, 2006). Politik identitas dapat didefinisikan sebagai tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, *gender*, atau keagamaan.

Tiap kelompok yang terpinggirkan (*subaltern*), seperti feminisme menuntut agar diakui sebagai suatu identitas kultural untuk tumbuh unik dan berbeda dalam sistem politik demokrasi terbuka, terutama dalam sistem politik negara. Tuntutan tersebut tampil ke permukaan dalam

sejumlah cara dalam dunia politik aktual, atas nama minoritas atau kelompok-kelompok "*subaltern*", dalam beberapa bentuk gerakan feminisme serta apa yang saat ini disebut sebagai politik "*multikulturalisme*". *The demand comes to the fore in number of ways today's politics, on behalf of minority or "subaltern" groups, in some forms, of feminism and in what is today called the politics of "multiculturalism"* (Charles, 1994).

Bahaya Tidak Adanya Pengakuan

Tidak ada pengakuan atau kesalahan pengakuan dapat menimbulkan kerugian, bisa menjadi bentuk penindasan, memenjarakan seseorang dalam kepalsuan, dan penyimpangan. Jadi beberapa feminis berpendapat bahwa perempuan di patriarki masyarakat telah dibujuk untuk mengadopsi sebuah pemikiran yang menjatuhkan harga diri mereka sendiri. Mereka telah di internalisasi gambar rendah diri mereka sendiri, sehingga bahkan ketika beberapa tujuan hambatan untuk kemajuan mereka terjatuh, mereka mungkin mampu mengambil keuntungan dari peluang baru. Dan diluar ini, mereka dipastikan akan menderita rasa sakit karena rendah harga diri.

Titik analog telah dibuat sehubungan dengan kulit hitam: bahwa masyarakat kulit putih memiliki generasi untuk memproyeksikan serta merendahkan gambar dari mereka, yang sebagian dari mereka tidak mampu untuk menolak mengadopsi. Mereka sendiri depresi, hal ini terlihat menjadi salah satu instrumen yang paling ampuh dari penindasan mereka sendiri. Tugas pertama mereka seharusnya untuk membersihkan identitas diri yang dikenakan dan merusak ini.

Menerima Identitas Kultural Sebagai *Given* (*Keterberian*)

Taylor mengkritik teori liberal yang memberi tekanan pada individu. Menurut Taylor ada pengakuan identitas individu dan ada pengakuan identitas kelompok kultural. Identitas individu bersifat partikular. Yang penting adalah pengakuan terhadap identitas kultural karena pengakuan ini merupakan kebutuhan vital manusia. Pengakuan identitas berfokus pada perbedaan identitas yang meliputi etnik, agama, ras dan lain lain yang dipakai untuk menghimpun orang atas dasar kesamaan yang dimiliki (Charles, 1994).

Seorang anak dari bapak Jawa dan Ibu Jawa, maka ia akan

menyandang identitas sebagai suku Jawa. Ketika ia lahir dari seorang ayah Tionghoa dan ibu Tionghoa, secara otomatis ia akan mendapatkan identitas sebagai etnis Tionghoa. Dan juga, ketika seseorang lahir dari ayah dan ibu seorang pemeluk agama Islam, seorang anak akan langsung mendapat identitas sebagai pemeluk agama Islam, begitu juga bila ibu dan bapak Kristen, maka anaknya mendapat identitas pemeluk kristiani. Identitas kultural adalah *given* (pemberian) menurut Taylor.

Menyikapi Geloranya Arus Globalisasi Sebagai Upaya Memperkuat Akar Identitas

Ketika terjadi pertemuan antara globalisasi negara-bangsa dan kelompok identitas, maka kemunculan dari kelompok-kelompok identitas ini semakin menguat. Globalisasi mendorong akan penguatan kesadaran politik dalam kelompok-kelompok ini, dan membuka kesadaran yang mendorong akan pentingnya identitas (Gahral, 2006). Globalisasi memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok identitas untuk menemukan akar identitasnya (Budiarto, 2012).

Taylor juga mengemukakan politik martabat manusia. Kemunculan politik martabat manusia merupakan

respon terhadap perlakuan pada kelompok-kelompok manusia yang seringkali diperlakukan secara tidak adil, yaitu dipandang martabatnya tidak sama (Budiarto, 2012). Manusia memiliki kesamaan martabat yang harus dihormati dan harus mendapat pengakuan. Kesamaan tersebut terungkap dalam hak dan kebebasan yang sama seperti tercantum dalam katalog hak-hak asasi manusia.

***Intimate Sphere* (Ruang Individu) dan *Public Sphere* (Ruang Sosial)**

Ada dua wacana pengakuan (*regocnition*) yaitu *intimate sphere* (ruang individu) dan *public sphere* (ruang sosial). Berdasarkan kedua level ini terdapat dua jenis identitas, yaitu identitas individu dan identitas kelompok. Identitas individu adalah identitas personal yang keberadaannya didasarkan pada karakteristik-karakteristik unik pada diri seseorang. Sementara identitas kelompok merupakan hasil pertautan antar identitas yang berada di dalamnya (Budiarto, 2012).

Dalam *intimate sphere* diperlukan dialog untuk memahami formasi identitas. Argumen kita berkembang dalam dialog dan sering terjadi dalam perjuangan berhadapan dengan segala sesuatu yang kita artikan

dalam hubungan dengan yang lain yang menghadirkan diri dihadapan kita. Dalam *public sphere* diperlukan politik pengakuan kesamaan martabat yang terus berkembang tanpa henti, seperti yang dilakukan oleh feminisme.

Perubahan Dalam *Public Sphere* (Ruang Sosial)

Dewasa ini disinyalir ada dua perubahan yang terjadi dalam *public sphere*, yaitu runtuhnya hirarkhi sosial dengan perubahan mengenai pengertian martabat manusia. Perubahan kedua adalah munculnya pengertian baru dari identitas yang memunculkan politik perbedaan dalam prinsip kesetaran universal. Pengakuan begitu penting dalam teori politik dewasa ini (Budiarto, 2012).

Menurut Taylor konsep politik dibangun atas dasar ketegangan hubungan antara konsep martabat manusia universal yang memandang semua manusia sama dan aspek perbedaan atau pandangan tentang keunikan serta autentisitas setiap individu dan kultur (Charles, 1994). Ketegangan antara dua model politik ini bertolak dari pertanyaan dasar: Aspek manakah dalam diri manusia atau kultur mana yang menuntut pengakuan dari yang lain?.

Pengakuan Identitas Terbentuk Dalam Dialog

Kita mendefinisikan identitas kita selalu dalam dialog. Beberapa orang mungkin masih ingin berpegang pada beberapa bentuk dari ideal monologis. Memang benar bahwa kita tidak pernah bisa membebaskan diri sepenuhnya dari mereka yang cinta dan perawatan berbentuk kita sejak awal kehidupan, tetapi kita harus berusaha untuk mendefinisikan diri kita sendiri.

The monologis yang ideal serius meremehkan tempat dari dialogis dalam kehidupan manusia. Ia ingin membatasi sebanyak mungkin untuk usul tersebut. Tapi bagaimanapun orang merasa tentang hal itu, pembuatan dan mempertahankan identitas kita, dalam adanya upaya heroik untuk keluar dari eksistensi biasa, tetap dialogis sepanjang hidup kita. Sehingga menemukan identitas saya sendiri tidak berarti bahwa saya bekerja itu dalam isolasi, tetapi saya bernegosiasi melalui dialog, sebagian terbuka, sebagian internal dengan orang lain. Itu sebabnya pengembangan ideal identitas batin yang dihasilkan memberikan pentingnya baru untuk pengakuan. Identitas saya sendiri krusial tergantung pada hubungan dialogis saya dengan orang lain.

Membangun Keadaban Politik Pengakuan Sebagai Aspek Penting Dalam Membangun Identitas

Menurut Taylor demokrasi telah menghantarkan sebuah politik pengakuan yang setara yang mana telah mengambil beraneka bentuknya sepanjang sejarah, dan sekarang telah kembali dalam bentuk tuntutan-tuntutan demi status kesetaraan budaya-budaya dan gender (Charles, 1994).

Dalam politik martabat manusia, setiap manusia memiliki kesamaan yang harus dihormati dan harus mendapat pengakuan. Kesamaan tersebut terungkap dalam hak dan kebebasan yang sama seperti tercantum dalam katalog hak-hak asasi manusia. Taylor menekankan pentingnya aspek pengakuan dari yang lain dalam membangun identitas, baik identitas individual maupun kelompok. Hanya dalam keunikan, entah keunikan ras, agama, suku, gender atau aliran politik, manusia dapat menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sekarang muncul tuntutan kebutuhan akan pengakuan, yaitu pengakuan akan kesamaan nilai kultur-kultur (Habermas, 2007).

Kultur sebagai sistem nilai harus diakui dan betapa kecilnya suatu komunitas, membutuhkan pengakuan

terhadap nilai-nilai kulturenya. Kultur itu *given*, dan ada orang yang ingin menghayati dirinya sebagai yang unik. Tuntutan terhadap pengakuan kultur ada dasarnya, karena kultur ada akarnya. Bila ada kultur lain yang masuk (transkultural) pasti ada kepentingannya dan ada ketakutan nilai-nilai kultur yang *given* itu punah. Solusinya adalah pengakuan atas kesamaan nilai-nilai kultur.

Membeda Contradictio In Exercito **Agama**

Ada jarak antara cita-cita agama dan realita beragama. Agama selalu tampil dan dan memantulkan dua wajah yang bertentangan. Dari satu perspektif agama merupakan wadah untuk orang menemukan kedamaian, keintiman hidup dan harapan yang akan datang. Agama menjadi panutan dan pegangan untuk menumbuhkan semangat pengorbanan. Di dalam agama banyak menimbah kekuatan berhadapan dengan penderitaan, keputusan dan penindasan. Tidak bisa di abaikan bahwa begitu besarnya peranan agama dalam membangun peradapan manusia dan dalam mendisik serta mempertajam makna tanggung jawab.

Sangat menyedihkan ketika agama dikaitkan dengan fenomena

kekerasan. Atas nama agama orang bisa semena-mena memperlakukan orang lain. Agama di pakai sebagai instrumen yang di legitimasi demi kepentingan politik, hukum, ekonomi bahkan menjadi lahan suburnya bisnis, bahkan yang lebih menyedihkan agama di pakai untuk diskriminasi, sebagai alasan tindak kekerasan bahkan sampai pada pembunuhan. Pembelaan biasanya sangatlah noematif dengan mengatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian, menentang kekerasan, namun tidak jarang ada yang menyalah gunakan untuk kepentingan kelompok. Pembelaan diri yang normatif ini tidak menyadari bahwa ada jarak antara ‘yang seharusnya’ dan ‘yang faktual, antara ajaran dan praktek kehidupan. Justru masalah yang perlu dihadapi adalah bagaimana menjembatani jarak itu supaya ajaran agama semakin terwujud dalam kehidupan dan bukan hanya pembenaran kekerasan atau legitimasi kekuasaan.

Refleksi kebangsaan, bangsa Indonesia hari ini ialah bagaimana membangun sebuah sikap keadaban untuk membangun keutamaan bertoleransi, memahami perbedaan sebagai sesuatu yang terberi, dan memaknai perbedaan sebagai kekayaan bangsa ini sehingga keutuhan sebagai

bangsa yang multi kultural tetap terjaga (Wattimena, 2011). Namun akhir-akhir ini isu agama begitu mencuat dalam urusan bangsa ini, ada saling kecurigaan antara golongan yang satu dengan yang lain, ada semacam *claim* kebenaran dari golongan lain untuk mengontrol kesadaran kita sebagai warga negara, sehingga hilangnya keakraban berwarga negara.

Membeda Ideologi, Identitas dan Tradisi Kekerasan

Kalau agama menganjurkan pemeluknya untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, kenyataan sering berbicara lain. Kita sendiri menyaksikan dan sejarah mencatat betapa besar andil agama dalam membakar dan meniupkan kecurigaan, membangkitkan salah pengertian dan mengundang konflik. Agama kerap menjadi sumber diskriminasi. Lalu pembelaannya ialah bahwa agama bukanlah merupakan pemicu utama suatu konflik. Tidak sedikit pengamat dan pemuka agama menuding kesenjangan ekonomi, pertarungan kekuasaan politik, atau dengan kecemburuan sosial. Tetapi masalahnya, mengapa agama dikatakan bukan pemicu utama konflik justru memberi jaminan dukungan bagi pihak yang bersengketa?.

Agama sering, bukannya mengelakkan konflik, tetapi malahan memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. Pembenaran ini bukan hanya berfungsi meringankan atau memberi alibi tanggung jawab pribadi, tetapi semakin meneguhkan tekad, mempertajam permusuhan dan memistikan motif pertentangan menjadi perjuangan membela iman dan kebenaran, singkat kata demi Tuhan sendiri (Haryatmoko, 2010).

Dengan pemistisan motif tersebut, konflik berubah bentuk menjadi perjuangan yang mempertaruhkan tujuan akhir keberadaan manusia. Setiap kompromi akan dianggap sebagai kelemahan atau pengkhianatan. Motif konflik menjadi irasional. Irasionalitas itu tercermin dalam mencampuradukan kepentingan pribadi atau kelompok dengan kehendak Tuhan. Para pemuka agama tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya karena mencampuradukan itu adalah tanda tiadanya unsur kritis, tidak berfungsinya rambu-rambu pengarah pemahaman atau penafsiran. Kehendak Tuhan mau ditangkap secara langsung dalam ketelanjangan kemampuan manusia. Pendakuan bahwa agama mengajarkan yang baik memang benar, tetapi apakah para pemuka agama

menyadari bahwa ajaran (pengetahuan) dan tindakan itu masih ada jarak.

Agama yang kongkret adalah yang dihayati oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma moral, institusi, ritus, simbol, para pemukannya. Semua unsur yang memberi wajah kongkret agama ini bisa mengkristal dalam bentuk penafsiran terhadap yang berbeda, maka sangat rentan terjadi pertentangan. Konflik antara yang akhir-akhir ini terjadi karena disebabkan adanya kebencian dan tidak ada toleran dalam penerimaan yang berbeda. Apapun yang dikatakan pengamat bahwa ada rekayasa konflik itu, kebencian anatra yang berbeda itu memang sungguh ada dan dirasakan. Provokasi tidak akan berhasil kalau tidak ada kebencian. Sedikit provokasi saja akan mudah membakar perilaku agresif atau kekerasan terhadap yang berbeda. Kunci masalah terletak pada 'tidak bisa menerima yang berbeda'.

Pada dasarnya suatu kelompok sosial ingin menjaga identitasnya agar tetap murni dan menolak yang berbeda. Kehadiran pihak yang berbeda akan mengancam eksistensi saya. Agama lebih berperang fungsi ideologisnya sebagai pembenaran kekuasaan dan landasan simbolis kekerasan. Dan sangat dibutuhkan oleh semua pihak

dalam mengupayakan suatu keutuhan sebagai bangsa dan dibutuhkan agama sebagai upaya untuk berperan dalam ranah politik (Hidayati, 2008).

Upaya memahami kaitan agama dan politik menyentuh tiga mekanisme pokok yang menentukan; kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis), agama sebagai faktor identitas dan legitimasi etis hubungan sosial. Pertama fungsi agama sebagai ideologi: agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial sejauh mana tatanan sosial di anggap sebagai representasi religius, yang di kehendaki Tuhan. Kedua agama sebagai faktor identitas dapat didefenisikan sebagai kepemilikan pada kelompok tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, ethos. Ini lebih kental jika dikaitkan dengan identitas etnis. Ketiga agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial. Berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran, mekanisme ketiga ini bukan sakralisasi hubungan sosial, tetapi suatu tatanan sosial mendapat dukungan dari agama. Dalam konteks ini, formalisme agama menjadi unsur penting di dalam penghayatan karena

terkait dengan masalah pengakuan sosial dan kebanggaan kepemilikan kelompok. Maka butuh penanaman suatu sistem sosial, ekonomi, atau budaya dengan jargon-jargon agama yang akan semakin meningkatkan fanatisme agama.

Kesimpulan

Pemikiran mengenai politik pengakuan, relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang multikultur. Banyak fenomena sosial yang terjadi dapat tinjau berdasarkan pemikiran ini. Konflik-konflik *social* baik antar pribadi, antar kelompok maupun antar pribadi dengan kelompok yang berbau ras, agama, suku maupun budaya sering disebabkan oleh tidak adanya pengakuan identitas terhadap seseorang. Oleh karena itu untuk membangun identitas bangsa yang kuat perlu adanya keadaban untuk membangun pengakuan antara sesama anak bangsa, agar tercipta kerekatan sebagai suatu bangsa tetap terpelihara.

Daftar Pustaka

- Budiarto, Danujaya. (2012). *Demokrasi Sisensus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Charles, Taylor. (1994). *Multiculturalism, Examining the politics Of Recognition*. New Jersey: Princeton University.
- Gahral, Adian Donny. (2006). *Demokrasi Kami*. Depok: Kokoesan.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat; akar kekerasan dan diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hidayati, Mega. (2008). *Jurang diantara Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jurgen, Habermas. (2007). *The Structural Transformation Of the public Spehere* (Ter. Santoso Yudi), Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rahayu, Mustaghfiroh. (2017). "Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis)", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 1-18.
- Wattimena, Reza Alexander Antonius. (2011). "Menuju Indonesia yang bermakna: analisis tekstual-empiris terhadap pemikiran Charles Taylor tentang politik pengakuan dan multikulturalisme, serta kemungkinan penerapannya di Indonesia", *Studia Philosophica et Theologica*, 11(1).

Zazili, Ahmad. (2016). “Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/Phpu. A-Vii/2009)” *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 135-162.